

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang besar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang menjadi primadona. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,3% dan mematok pendapatan Negara sebesar Rp. 2,165,1 triliun. Sedangkan APBN tahun lalu tepatnya pada tahun 2018 memiliki target awal Rp. 1.894,7 triliun hingga Rp. 1.942,3 triliun dan pendapatan Negara mencapai 102,5%. Angka dalam APBN meningkat dari tahun 2018 dan 2019. Pajak merupakan alternative bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Negara (APBN). (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn2018-dan-apbn-2019>).

Self Assesment System sangat diberlakukan di Indonesia atas pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencatat sebagai Wajib Pajak atau dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila dalam pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan ternyata tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Wajib Pajak yang tidak setuju terhadap ketetapan pajak yang dikeluarkan kantor pajak, maka dapat mengajukan keberatan jika Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak karena tidak memenuhi persyaratan formal maka berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) , Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar, yang kemudian disebut dengan pembatalan SKP, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Dari hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tersebut. Sehingga dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat judul “Implementasi Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas bahwa dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

Bagaimana proses pengurangan atau pembatalan surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar pembahasan tidak terlalu menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan dalam tugas akhir ini ditekankan pada proses penyelesaian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pare berprofesi TNI Angkatan Laut bertugas sebagai tenaga kesehatan atas PPh Final atau penghasilan tertentu berupa harta bersih studi kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini disesuaikan dengan sebagaimana pokok masalah sebelumnya dengan mengkaji kedalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

2. Manfaat yang diharapkan bagi penulis di penelitian ini, berupa secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mengenai proses penyelesaian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Selain itu penelitian ini dapat menjadikan perbandingan konteks untuk penelitian selanjutnya.

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan maupun manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa atau Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai implementasi pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan dapat menjadikan sebagai dasar pemahaman lebih lanjut mengenai perpajakan.

2. Bagi Objek Penelitian

Melalui penelitian ini berharap dapat menjadikan bahan masukan bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, berupa ide, maupun gagasan bagi para pembaca yang membutuhkan referensi mengenai proses penyelesaian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.